

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada studi ini akan mengulas tentang pandangan Politisasi Agama Islam di era *Post-Truth* pada pemilihan umum (Pemilu) 2019, pemilihan umum yang diselenggarakan pada era *post-truth* ini menjadikan penguatan terhadap praktik politisasi agama dalam arena media sosial yang mayoritas di gunakan masyarakat seperti Instagram, Twiter, Whatsapp, dan lainnya dalam praktik politisasi agama islam ini melahirkan keresahan dan ancaman perpecahan dimasyarakat. Politisasi agama islam terlihat jelas pada setiap momen-momen seperti pemilihan umum (Pemilu), Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Politisasi pada era *Post-Truth* ini akan lebih terasa dikarenakan penyebaran informasi yang begitu cepat serta terdapat juga era pasca kebenaran yang di kenal *Post-Truth* yang dimana pada era ini kebenaran menjadi bias karna sumber konten dan informasi sudah tidak dapat tersaring, politisasi agama pada pemilu 2019 dapat di lihat sejak awal pendaftaran dari calon presiden dan wakil presiden yang dalam kampanye nya sering kali melibatkan para tokoh ulama dan Organisasi Masyarakat (ormas) yang berlatar belakang islam serta menggunakan atribut yang secara simbolis merujuk pada islam seperti peci, sorban, hingga tasbih. Politisasi dengan menggunakan simbol-simbol agama mewakili suatu identitas agama tertentu.

Sejak era kemajuan dibidang komunikasi yang telah berjalan, dengan sadar kita telah menyaksikan bagaimana politik elektoral yang berjalan telah menjadi arena dimana kebenaran dan kebohongan merebak dan membangun ketidakpastian politik, Pemilihan Umum (pemilu) di berbagai negara dan di Indonesia. Dalam beberapa bentangan sejarah peradaban manusia, relasi agama dan politik sangat erat, hal ini juga selalu menjadi pembahasan yang sangat menarik di perbincangkan. Pada tahun 2019 Indonesia terdapat pesta demokrasi pemilihan umum yang di laksanakan dalam 5 tahun sekali.

Dalam kontestasi Pemilihan umum (Pemilu) 2019 faktanya sangat begitu jelas bahwasannya terjadi fenomena politisasi agama islam di mana masing-masing kubu banyak menggunakan istilah dan melegitimasi peran ulama sebagai magnet politik guna mendapatkan simpatisan. Pada masa sebelumnya indonesia sudah di ramaikan dengan kasus kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, dimana pemilihan tersebut disebut sebagai yang terkotor, mempolarisasi, dan paling memecah belah, dimana pasangan Anis-Sandi berhasil mengalahkan pasangan Ahok-Djarot.

Gubernur DKI Jakarta lengser dikarenakan pernyataannya yang mengutip surat AL-Maidah ayat 51 saat melakukan kunjungan di kepulauan seribu terkam kamera dan tersebar di media, pernyataan ini menjadi ramai dan di anggap sebagai penodaan agama oleh sebagian besar masyarakat Jakarta, dan membuat gubernur Dki Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendapat vonis 2 tahun penjara dan mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam kampanye pada kubu Anis-Sandi yang condong ke arah religius juga diamini oleh kelompok akar-rumput.

Masa kampanye pada Pemilihan Gubernur ini menjadi sangat terasa karena diwarnai dengan strategi politisasi identitas dan agama Islam yang digunakan. Aksi 411 dan 212 yang menuntut Ahok dipenjara atas tuduhan penistaan agama dilihat sebagai upaya politisasi agama Islam untuk memenangkan pasangan Anis-Sandi.

Di Indonesia hingga saat ini, dari mulai sebelum hingga sesudah kemerdekaan juga tidak lepas dari kontroversi relasi agama (khususnya Islam) dan politik. Relasi agama dan politik sudah berjalan lama dalam sejarah sosial Indonesia. Dengan sejarah politisasi agama di Indonesia khususnya juga sudah menjadi fenomena dan fakta yang tidak baru didengar. Jauh sebelum Indonesia merdeka tahun 1945, politisasi agama, khususnya politisasi agama Islam sudah menjadi pandangan lumrah di masyarakat.

Sejak awal abad ke-20 sendiri ketika pada saat itu banyak berbagai kelompok sosial politik keagamaan yang mulai berdiri di Indonesia, berbagai kelompok Islam baik yang puritan reformis seperti Muhammadiyah, Persis dan lainnya.¹ Tradisionalis seperti Nahdathul Ulama, Perti, Alkhairat dan lainnya. Sebagaimana ada juga komunis sosialis seperti Serikat Dagang Islam, Partai Komunis Indonesia, dan lainnya yang sama menggunakan teks, wacana, jargon dan simbol keislaman tertentu untuk menarik simpati publik masyarakat pada ormas yang di prakarsai.

Polarisasi akibat adanya perbedaan pilihan politik dan keberlimpahan informasi yang difasilitasi oleh platform media baru menjadi lahan subur bagi beragam bentuk disinformasi yang menyesatkan dan tidak jelas basis

¹ Al Qurtuby, S. (2018). Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia. MAARIF, 13 (2), 43–54

kebenarannya. Produksi hoaks, berita palsu dan ujaran kebencian menjadi sulit di kendalikan yang dapat mengancam praktik pemilu yang demokratis sebagaimana impian masyarakat.

Era *Post-truth* merupakan era bagi orang yang mementingkan dan mengutamakan emosi yang bersifat kepercayaan dari pada mementingkan dan mengedepankan rasionalitas berdasarkan fakta.² Situasi pada era *Post-Truth* tersebut Jika dihubungkan dengan Pemilu tahun 2019 akan menemukan relevansi dan pada akhirnya membutuhkan perhatian khusus. Relevansi tersebut terletak pada Pemilu yang memberikan ruang untuk terjadinya hubungan antara pemilih dengan orang yang dipilih berdasarkan kepercayaan. Ini merupakan relevansi antara era *post-truth* dengan Pemilu.

Hoax dan *post-truth* ini menjadi suatu bagian dalam kajian Sosiologi Agama karena sebagian hoax di Indonesia berkaitan dengan agama, di mainkan dengan mengeksploitasikan agama dengan tujuan membakar emosi massa untuk keuntungan politik, di Indonesia ini sendiri hoax ataupun propaganda paling banyak berkaitan dengan agama atau tokoh agama, terlebih lagi mayoritas penduduk di Indonesia memeluk agama Islam, yang di mana sangat dikenal oleh sebagian masyarakat dengan stigma yang fanatis dan radikal pada beberapa golongan tertentu, seperti beberapa ajaran yang mencoreng identitas agama Islam dengan pengajaran yang radikal.

² Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era *Post-Truth*: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44-58.

Terlebih lagi seringkali agama islam menjadi salah satu korban politisasi di Indonesia, masa menjelang pemilu ini menjadi salah satu ajang banyaknya muncul hoax dan politisasi agama terjadi. Dengan kita sadari bagaimana pada pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 2019 itu muncul banyak sekali polemik seperti pada masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) sangat erat sekali dengan politisasi agama islam, dimana calon Presiden dan Wakil Calon Presiden pada dua kubu saling merangkul para tokoh golongan islam dari berbagai daerah, seperti yang kita lihat dengan pemilihan KH.Ma'ruf amin yang ditunjuk sebagai Wakil dari Jokowi dan Prabowo-Sandi yang berkampanye dengan organisasi-organisasi islam.

Dalam penelitian ini saya mengambil pandangan atau makna Politisasi Agama pada mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah dimana pandangan merupakan reaksi yang di orientasikan terhadap stimulus. Persepsi di tentukan oleh pengalaman sejarah dan sikap dari penerimaan stimulu pada saat ini, dan karna persepsi merupakan suatu proses, maka ia akan memepengaruhi beberapa faktor dan keterkaitan erat dengan kondisi lingkungan berada. Persepsi mahasiswa terhadap fenomena atau gejala politik akan berpengaruh terhadap sikap politik dan sekaligus perilaku politiknya.

Indonesia pada setiap peran politik mahasiswa sabagai kaum intelektual sudah mempunyai sejarah perjalanan di republik ini. Bila di kaji lebih jauh lagi gerakan mahasiswa di indonesia memiliki sejarah panjang Sejak masa kolonial. Dalam penelitian ini saya akan mengurai bagaimana pendangan mahasiswa tentang makna politisasi agama islam di era *post-truth* pemilu 2019?.

Karna telah kita sadari bahwa di era *post-truth* ini kebenaran yang sudah begitu bias bagi masyarakat serta kebanjiran informasi yang begitu cepat membuat kampanye pesta demokrasi di media sosial juga begitu rumit. Dengan segenap kemampuan mahasiswa yang mempunyai gerakan perlawanan yang netral dan sukses maka saya ingin menggali tentang persepsi pandangan mahasiswa terhadap agama islam yang sering di politisasi dalam pemilu yang akan di selenggarakan di tahun 2019.

Penulis mengkaji guna mengetahui seberapa keritis mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dalam fenomena praktik politisasi agama islam yang terjadi di tahun 2019 dan dengan mengetahui bentuk-bentuk politisasi agama islam yang dapat menyebabkan menguatnya politik kebencian atas nama agama akan memudahkan dalam mencari cara dalam mengendalikan dan meminimalisir potensi perpecahan masyarakat beragama pada saat kondisi pemilu.

Studi ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan mahasiswa terhadap politisasi agama islam di era *post-truth* pemilu 2019 yang sebagaimana penulis ketahui pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sangat banyak menggunakan simbol-simbol agama islam baik di media sosial maupun dan lingkungan sekitar yang menyebabkan menguatnya politik kebencian. Politisasi agama islam yang paling banyak dirasakan pada masa kampanye politik di tahun 2019 seperti penggunaan bahasa, simbol, dan narasi agama islam seperti menampilkan sisi ke-islaman dan identitas ke-ulamaan.

Kontekstasi pengambilan era *pos-truth* dalam penelitian ini dikarenakan pada tahun politik atau pada masa kampanye politik *post-truth* ini menjadi era yang mendukung komunikasi politik dan isu keagamaan. Karna pada media sosial setiap orang dapat mengakses serta membuat argumen serta tafsirnya sendiri bukan dengan fakta atau realitas kebenaran. Tahun politik yang terjadi pada tahun 2019 harusnya sudah berkaca dari kasus politisasi agama islam yang terjadi pada saat elektoral Gubernur DKI Jakarta pada tahun sebelumnya, walaupun proses elektoral berlangsung di DKI Jakarta namun sentimennya meluas sampai ke wilayah lain. Gejolak kontestasi pada pemilihan gubernur yang telah melahirkan fenomena gerakan 212 yang sukses pada saat sebelumnya di politisasi kembali dengan mengadakan aksi reuni 212, hal ini terlihat politisasi agama islam yang telah berjalan di masa sebelumnya menjadi sebuah momentum dalam agenda politik pada tahun 2019.

Era *post-truth* yang mempunyai kekuatan dari komunikasi yang didominasi oleh media sosial ternyata menjadi salah satu pemicu munculnya gerakan baru dimana pada masa kampanye muncul seperti gerakan #2019GandiPresiden yang menjalar tidak hanya di media sosial dan berlanjut dengan bergerak di ruang masyarakat, bahkan dengan penggunaan ruang mesjid yang digunakan untuk menanamkan sentimen agama dalam melancarkan tujuan politik dari salah satu kubu.

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang makna politisasi Agama Islam di era *Post-truth*?
2. Apa Konsekuensi pandangan mahasiswa tentang politisasi agama islam terhadap praktik-praktik berpolitik di Indonesia?

1.2 Tujuan Penelitian

untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang politisasi agama ilslam di era *post-truth* pemilu 2019.

1.3 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan bagi penulis maupun pihak-pihak lainnya. Dimana manfaat-manfaat tersebut terdiri dari :

1. Bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Pandangan Mahasiswa.
2. Mengetahui Pandangan Mahasiswa Terhadap Politisasi Agama Islam di Era *Post-Truth* Pemilu 2019.
3. Hasil penelitian dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti- peneliti lainnya, khusus nya penelitian terkait Pandangan Mahasiswa Terhadap Politisasi Agama Islam di Era *Post-Truth* pemilu 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari tiga bab yang disertai dengan beberapa sub-bab yang berbeda-beda. Berikut penjelasan mengenai sistematika penulisan proposal skripsi :

- **BAB I PENDAHULUAN**

Di dalam Bab I ini merupakan pendahuluan dari proposal skripsi yang saya buat yang terdiri dari lima sub-bab yang terbagi menjadi latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

- **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Di dalam Bab II ini merupakan isi dari kajian pustaka yang terdiri dari tiga sub-bab yang terbagi menjadi penelitian terdahulu yang relevan, pengertian dari kajian kepustakaan yang terdiri dari studi pustaka, kerangka teori, atau teori pendukung lainnya.

- **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Di dalam Bab III terbagi menjadi lima sub-bab dalam metodologi penelitian yaitu pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

- **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Pada bagian Bab IV ini berisi pembahasan dan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, beberapa hal yang ada dalam bab ini yaitu

gambaran umum dan serta hasil analisis dengan menggunakan teori yang telah dipilih oleh peneliti.

- **BAB V PENUTUP**

Pada bab penutup ini merupakan bagian yang berisi hasil akhir dari penelitian yang sudah dilakukan, Adapun isi dari bab ini yaitu kesimpulan dan saran.

- **DAFTAR PUSTAKA**

Pada bagian ini peneliti menyertakan barbagai referensi yang diambil sebagai sumber data dalam proses penulisan penelitian ini.

- **LAMPIRAN**

